BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Direktur Jasa Keuangan dari BUMN Kementrian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani mengatakan, kondisi sektor keuangan di Indonesia masih dangkal hal tersebut dapat dilihat dari dari beberapa indikator M2 per PDB, dana pihak ketiga per PDB, kredit domestik sektor privat per PDB, maupun asset dana pensiun per PDB. Hal ini membuat Indonesia kalah dibandingkan dengan negara negara tetangga Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Menurut Muhammad Cholifihani mengatakan bahwa sebenarnya M2 per PDB potensial, yaitu 62,60%, tetapi ternyata realisasinya hanya 38%, maka pedalaman keuangan atau financial deepening di Indonesia masih dangkal (Alaydrus, 2019).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada industri keuangan di Indonesia masih dapat dikatakan adanya pendangkalan berbeda dengan beberapa negara di Asia. Pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak dapat lepas dari sektor keuangan. Sektor keuangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menumbuhkan suatu perekonomian yang baik, efektif dan efisien, membutuhkan sistem keuangan yang dapat memberikan atau meyalurkan dana yang dimiliki oleh masyarakat pemilik dana terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan dana agar memiliki kesempatan berinvestasi yang produktif (Ningrum, Viphindrartin, & Santosa, 2015).

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi masyarkat, sarana investasi dalam berbagai instrument keuangan, dan peran sektor keuangan sebagai fungsi intermediasi. Keseluruhan kegiatan sektor keuangan yang meliputi peran sebagai intermediaris dan perantara investasi masyarakat tersebut dapat menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi yang baik sehingga meningkatkan banyak lapangan pekerjaan, mempengaruhi

nilai tambah ekonomi, serta dapat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dan aset—aset lembaga keuangan yang memiliki peran penting pada industri keuangan di Indonesia (Latifah, 2016).

Peranan dan berbagai aktivitas sektor jasa keuangan tersebut terhadap ekonomi sering disebut sebagai *financial deepening* (kedalaman sektor keuangan suatu negara). *Financial deepening* merupakan sebuah terminologi yang digunakan untuk menunjukan terjadinya kenaikan peranan dan aktivitas sektor keuangan terhadap ekonomi (Latifah, 2016). Tujuan utama *financial deepening* adalah meningkatkan rasio tabungan domestik terhadap pendapatan, untuk meningkatkan (memperdalam) ukuran sistem moneter untuk menghasilkan peluang keuntungan bagi investor serta memperkuat proses mobilisasi dan alokasi tabungan, hal ini memungkinkan alokasi yang lebih baik dari tabungan dengan memperluas dan mendiversifikasi pasar keuangan dan pasar modal yang peluang investasi bersaing untuk aliran tabungan (Sembiring & Sukamulja, 2015).

Pembangunan jasa–jasa keuangan dalam suatu negara dalam kenyataannya terdapat kondisi dimana jasa keuangan tersebut dapat dikatakan mengalami pendalaman atau *financial deepening* dan kondisi mengalami suatu pendangkalan atau dapat dikatakan *shallow finance* (Sembiring & Sukamulja, 2015). Terdapat sebuah teori *financial deepening* yang menjelaskan sebuah pengaruh positif dari sektor keuangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kegiatan suatu sektor. Artinya, kegiatan ekonomi yang efektif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diartikan mampu menumbuhkan alokasi yang baik. Berdasarkan studi pembangunan, *financial deepening* dapat mengarah pada kemajuan penyedia pelayanan sektor keuangan dengan diberikan layanan yang efektif dimaksudkan untuk kemajuan semua masyarakat.

Pengukuran sektor jasa keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator kuantitatif dasar, yaitu dengan rasio moneteisasi dan rasio intermediasi.Rasio tersebut dapat dibedakan dengan beberapa penjelasan yaitu jika rasio monetesisasi didalamnya terdapat uang dijadikan sebagi pengukuran dasar (*liquid liabilities*) contohnya seperti jumlah uang beredar pada PDB. Sedangkan pada rasio intermediasi atau rasio *intermediaries* terdapat beberapa pengukuran yaitu

pengukuran mengenai beberapa langkah berbasis lembaga keuangan seperti bank yang di implementasikan pada kredit atau pembiayaan bank untuk kapitalisasi pasar saham (Panjawa & Widyaningrum, 2018).

Perkembangan *financial deepening* yang dihasilkan dari indikator jumlah uang beredar (M2) terhadap produk domestik bruto (PDB). Semakin tinggi rasio jumlah uang beredar (M2) terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki artian bahwapenggunaan indikator uang dalam suatu perekonomian tersebut akan semakin mendalam, akibatnya dengan pendalaman tersebut akan menghasilkan peningkatan rasio *financial deepening*. Hal ini menunjukkan bahwakebijakan ekonomi yang ada di Indonesia tergolong efisien. Selain itu, semakin dalam sektor keuangan di Indonesia dan semakin luas penggunaan uang akan mengakibatkan semakin besar peran sektor keuangan dan sektor pasar uang (Ridwan, 2017).

Sebaliknya apabila rasio *financial deepening* berkurang atau semakin kecil akan mengakibatkan semakin berkurang atau dangkal pula peran jasa keuangan di indonesia. Ukuran untuk mengetahui *financial deepening* dalam atau dangkal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Ukuran *Financial Deepening*

Ukuran	Kategori		
M2 > 20% dari PDB	Financial deepening dalam		
M2 < 20% dari PDB	Financial deepening dangkal		

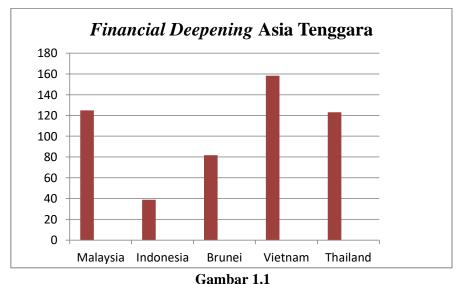
Sumber: (Aizenman & Crichton, 2006)

Dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa jika batas awal rasio antara M2 terhadap PDB sudah mencapai angka rasio tertentu yang sudah mencakup minimal 20% dari PDB, maka ekonomi tersebut sudah dianggap mengalami *financial deepening*. Sebaliknya apabila hasil perhitungan M2 terhadap PDB menghasilkan angka rasio kurang dari 20% dari PDB maka ekonomi dalam suatu negara belum dalam atau mengalami kedangkalan *financial deepening* (Aizenman & Crichton, 2006).

Beberapa Negara di Asia *financial deepening* nya sudah menunjukkan pedalaman yang berarti sektor keuangannya sudah berperan dengan baik.Berbeda dengan Indonesia yang masih dangkal tersebut dapat dilihat dari beberapa

pengukuran yaitu terutama pada rasio M2/PDB (Panjawa & Widyaningrum, 2018).

Selaras dengan pernyataan Bank Indonesia bahwa sektor keuangan di indonesia masih berperan dangkal terhadap perekonomian di Indonesia, terdapat sebuah data yang menunjukkan bahwa *financial deepening* di Indonesia masih perlu adanya peningkatan agar dapat bersaing dengan Negara – Negara kawasan Asia. Berikut perbandingan *financial deepening* Indonesia denga beberapa Negara Asia Tenggara:



Perbandingan Financial Deepening di Indonesia
Sumber: World Bank (2019)

Dalam gambar 1.1 terlihat perbedaan *financial deepening* Indonesia dan beberapa Negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand. Dari 5 negara tersebut *Financial deepening* Indonesia terlihat memiliki rasio yang paling rendah, yaitu sebesar 38.8 persen, sedangkan negara lain telah mencapai lebih dari 80 persen. Dari 5 negara tersebut *financial deepening* tertinggi adalah Vietnam sebesar 158 persen. Data tersebut mendukung bahwa sektor keuangan Indonesia masih berpotensi dangkal.

Adapun M2/PDB Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Uang Beredar dan *Financial Deepening*

Terkembangan suman Cang Beredar dan Tinuncian Beepening									
	Uang Beredar (Triliun Rp)				PDB	Rasio (%)			
Tahun			Surat						
	M1	Uang	Berharga	M2	(Triliun M	M1/PDB	M2/PDB		
		Kuasi	Selain		Rp)				
			Saham						
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)		
2013	887,08	2.820,52	22,81	3.730,41	9.546,13	9,29	39,08		
2014	942,22	3.209,48	21,63	4.173,33	10.569,71	8,91	39,48		
2015	1.055,44	3.479,96	13,40	4.548,80	11.526,33	9,15	39,46		
2016	1.237,64	3.753,81	13,53	5.004,98	12.406,77	9,98	40,34		
2017	1.390,81	4.010,00	18,36	5.419,17	13.588,80	10,23	39,88		
2018	1,457,14	4.282,36	19,05	5.760,04	14.837,40	10,40	38.88		

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018)

Berdasarkan tabel 1.2, Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2013 - 2018. Rasio M2/PDB dari 2013 - 2018 mengalami fluktuasi. Walaupun *financial deepening* di Indonesia cenderung meningkat, akan tetapi *financial deepening* di Indonesia belum mencapai potensi yang ditargetkan. Adanya gejolak perekonomian, di Indonesia maupun global akan mempengaruhi atau berdampak pada sektor – sektor keuangan yang ada di Indonesia. Sementara itu, rasio *financial deepening* di Indonesia masih dapat dikatakan dangkal atau tergolong rendah.

Rasio *financial deepening* di Indonesia masih berkisar kurang lebih 38%, angka tersebut belum mencapai potensi *financial deepening* di Indonesia, atau dapat dikatakan kurang dari potensi yang dimiliki Indonesia (Panjawa & Widyaningrum, 2018). Oleh karena itu, peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada bagaimana perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Terkait dengan hal ini, Indonesia perlu berupaya lebih banyak untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara berkembang lainnya dalam hal mengembangkan sektor keuangan (Panjawa & Widyaningrum, 2018). Menurut shaw, teori pendalaman keuangan atau *financial deepening*ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio antara jumalah uang beredar (M2) dengan PDB, sebaliknya semakin kecil rasio jumlah uang beredar (M2) terhadap PDB maka menunjukkan semakin dangkal sektor keuangan suatu negara (Ruslan, 2011).

6

Semakin tinggi pedalaman keuangan makasemakin meluas kegiatan lembaga keuangan, pasar modal maupun pasar uang di suatu negara.

Dilansir dari kontan.co.id, Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Naution menilai pedalaman pasar yang dilakukan di Indonesia masih belum berhasil, padahal menurutnya pendalaman pasar merupakan salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban fiskal yang ditanggung pemerintah dalam membangun infrastruktur (Hadyan, 2019).

Dibutuhkan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan *financial deepening*. Beberapa strategi untuk meningkatkan pedalaman keuangan di Indonesia tersebut diantaranya yaitu suatu perencanaan dan suatu pelaksanaan dalam kebijakan untuk meningkatkan perekonomian dilakukan upaya dengan meningkatkan akses pada sektor keuangan, dengan adanya keterbukaan dan efisensi dan meningkatkan *rate of return* yang efektif (Ruslan, 2011).

Perbankan syariah menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediaries* dapat dengan beberapa strategi yaitu dapat lebih fokus untuk mengalokasikan dana yang telah dihimpun (DPK) dengan memberikan pembiayaan baik untuk investasi atau kebutuhanlainnya. Dari dana yang dihimpun tersebut menimbulkan investasi dikalangan nasabah sehingga dapat menambah total aset bank syariah. Serta dapat juga dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor perbankan itu sendiri, yakni dengan melakukan berbagai layanan kepada masyarakat luas seperti penambahan unit bank sehingga fungsi dari sektor perbankan itu sendiri dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Latifah, 2016).

Sektor perbankan yang kompetitif dan berkembang dengan baik mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor perbankan harus mampu memobilisasi, menggabungkan dan menyalurkan tabungan domestik menjadi modal produktif serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan permintaan untuk instrumen keuangan yang baik sehingga pada hakikatnya akan menghasilkan pertumbuhan pada jasa keuangan (Panjawa & Widyaningrum,

7

2018). *Financial deepening* menyiratkan kemampuan lembaga keuangan pada umumnya, untuk secara efektif memobilisasi sumber daya keuangan untuk pembangunan (Ningrum, Viphindrartin, & Santosa, 2015).

Dalam penelitian Amy Latifah (2016), menyatakan bahwa sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah merupakan dua sektor yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari kedalaman nilai *financial deepening*. Dalam penelitian ini variabel Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Syariah, Sukuk Korporasi, dan Sukuk Negara bersama—sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *Financial Deepening* di Indonesia.

Menurut penelitian M Mahfud Ridwan (2017), menyatakan bahwa Semakin meningkatnya peranan sektor perbankan dan pasar modal melalui peningkatan kontribusi pembiayaan, sukuk korporasi, dan sukuk negara sehingga dapat mempengaruhi nilai *financial deepening* suatu negara. Hasil penelitian ini variabel pembiayaan syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara bersama—sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *financial deepening* di Indonesia dan di Malaysia. Begitu pula dengan hasil penelitian Arif Himmawan (2017), menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, Sukuk Korporasi, dan Sukuk Negara bersama—sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *Financial Deepening* di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian sebelumnya yang membahas *financial deepening* dengan variabel perbankan syariah dan pasar modal syariah sebagai variabel X masih sangat terbatas. Perbedaan penelitian ini yaitu dengan menambahkan periode penelitian hingga tahun 2018 dan menggunakanmetode regresi linier berganda. Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel sektor keuangan syariah sebagai variabel X dan *financial deepening* sebagai variabel Y.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik menelitifinancial deepening di Indonesia dengan judul " Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bank Syariah, Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi terhadap Financial Deepening di Indonesia Periode 2014 -2018"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

- 1. Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada industri keuangan di Indonesia masih dapat dikatakan adanya pendangkalan berbeda dengan beberapa Negara di Asia. Beberapa Negara di Asia financial deepening nya sudah menunjukkan pedalaman yang berarti sektor keuangannya sudah berperan dengan baik. Berbeda dengan Indonesia yang masih dangkal tersebut dapat dilihat dari beberapa pengukuran yaitu terutama pada rasio M2/PDB (Panjawa & Widyaningrum, 2018).
- Indonesia masih dihadapkan pada pendalaman pasar yang sangat dangkal, M2 per PDB Indonesia itu sebenarnya potensial sebesar 62,60%. Akan tetapi pada kenyataannya M2 per PDB Indonesia hanya sekitar 38% (Alaydrus, 2019).
- 3. *Financial deepening* Indonesia paling rendah di beandingkan dengan beberapa negara asia tenggara (World Bank, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dipaparkan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, sukuk negara, sukuk korporasi dan *financial deepening* di Indonesia ?
- 2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia?
- 3. Bagaimana pengaruh Sukuk Negara terhadap *financial deepening* di Indonesia?
- 4. Bagaimana pengaruh Sukuk Korporasi terhadap *financial* deepening di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai dana pihak ketiga, pembiayaan bank syariah, sukuk negara dan sukuk korporasi terhadap *financial deepening*, dan untuk menganalisis bagaimana pengaruh perbankan syariah yang meliputi variabel dana pihak ketiga (DPK), sukuk negara dan sukuk korporasi terhadap *financial deepening* di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya terkait masalah yang diteliti mengenai *financial deepening*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *financial deepening* dan dapat membantu pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian ini.